

Sengketa Pajak Terkait Pembebanan Hapus Buku Kredit Pada BPR X

Oleh:
Amalia Hanin Azzahra
5160121005

Laporan Tugas Akhir ini membahas mengenai penyelesaian sengketa banding pajak terkait pembebanan hapus buku antara Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan BPR X. pokok permasalahan penelitian ini terletak pada bagaimana terjadinya sengketa pajak dan penyelesaiannya melalui proses keberatan dan banding. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sengketa pajak pada BPR X terjadi karena perbedaan perhitungan antara BPR X dengan fiskus KPP Pratama Klaten pada salah satu komponen Pengurangan Penghasilan Bruto, yaitu Biaya PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif). KPP Pratama melakukan pembatalan Hapus Buku Kredit karena tidak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku, dan berakibat pada koreksi fiskal pada pos Biaya PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif) sehingga menambah Penghasilan Neto. Bertambahnya Penghasilan Neto menyebabkan timbulnya pajak yang masih harus dibayar oleh BPR X dan kemudian hal ini menjadi sengketa. BPR X kemudian mengajukan permohonan keberatan kepada KPP Pratama untuk membatalkan koreksi Fiskus tetapi hanya dikabulkan sebagian, lalu BPR X mengajukan permohonan Banding untuk tetap membatalkan koreksi Fiskus tersebut kepada Pengadilan Pajak. Majelis Hakim kemudian mengabulkan seluruhnya permohonan Banding BPR X karena Fiskus (Terbanding) tidak bisa mempertahankan koreksinya. Hasil penelitian menyarankan bahwa BPR X harus lebih banyak melakukan komunikasi dengan KPP Pratama Klaten agar memiliki kesamaan penafsiran, serta meningkatkan kinerja dan pengetahuan Fiskus karena masih banyaknya aturan yang multi tafsir, membuat perbankan secara umum, kesulitan menerapkan ketentuan tersebut. Sering dijumpai penafsiran oleh seorang pegawai pajak dan pegawai lainnya berbeda. Demikian pula halnya, satu kantor pajak di suatu kota berbeda penerapannya dengan kantor pajak di kota lainnya. Hal ini agar kepentingan semua pihak terpenuhi sehingga dapat tercapai rasa keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat dan citra yang lebih baik bagi Pengadilan Pajak sebagai tempat mencari keadilan.

Kata kunci : Sengketa Banding, Pengadilan Pajak

Tax Disputes Regarding Charges to Delete Credit Books at BPR X

Amalia Hanin Azzahra
5160121005

This Final Project Report discusses the resolution of tax appeal disputes related to the write off of the Directorate General of Taxes (DGT) and BPR X. The main problem of this research lies in how the tax dispute occurs and its resolution through the process of objection and appeal. This research is a qualitative research with a descriptive approach. Tax disputes on BPR X occur because of differences in calculations between BPR X and the KPP Pratama Klaten tax officer on one component of the Gross Income Reduction, named the Cost of PPAP (Allowance for Earning Assets Removal). KPP Pratama cancels the Credit Write Off because it is not in accordance with the applicable tax provisions, and caused a fiscal correction in the PPAP Fee post (Allowance for Earning Assets Removal) that increasing Net Income. Increased Net Income causes taxes to be accrued by BPR X and then this becomes a dispute. BPR X then filed an objection to KPP Pratama to cancel the correction of the Fiscal Authority but only partially granted, then BPR X submitted an appeal request to continue canceling the correction of the Fiscal Code to the Tax Court. The Panel of Judges then grants all of the BPR X Appeal requests because the (accuser) Fiscal cannot defend the correction. The results of this study suggest that BPR X must communicate more with the Klaten Primary KPP in order to have the same interpretation, and improve the performance and knowledge of the Fiscal because there are still many interpretive rules, making banks in general, having difficulty implementing these provisions. Interpretation done by a tax employee and other employees is different. Likewise, a tax office in a different city applies it differently from a tax office in another city. Similarity of interpretation is needed so that the interests of all parties are fulfilled and a sense of justice and legal certainty can be achieved for the community and a better image for the Tax Court as a place to seek justice.

Keywords: Appeal Dispute, Tax Court